

## ESTIMASI FUNGSI KONSUMSI PANGAN DAN NON PANGAN PENDUDUK PERKOTAAN PROPINSI JAMBI

---

*Adi Bhakti*

Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jambi  
adibhakti@unja.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to identify and analyze the development of consumption expenditure of urban residents, the spending patterns of food and non food consumption of urban residents, the MPC for food and non food of urban residents, and the function of food and non food consumption of urban residents in Jambi province. Descriptive analysis method was used as data analysis in this study. The results of this study showed that during the time period of 1993-2011 per capita consumption expenditure of urban residents in Jambi always increase with an average of 52.11 percent per three years, or 17.37 percent annually. Meanwhile, the pattern of consumption expenditure of urban residents in Jambi province is still dominated by food consumption expenditure by the average of 55.09 percent while non-food consumption only amounted to 44.01 percent. However, the spending patterns of food and non food consumption of urban residents Jambi province has changed. The function of food consumption of urban residents Jambi province during the period 1993-2011 was by 25.8 percent and 23.8 percent for non-food.*

**Keyword:** *The function of consumption, consumption patterns, food and non-food*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan, pola pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan, MPC untuk pangan dan non pangan penduduk perkotaan, dan fungsi konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode waktu 1993-2011 pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi selalu mengalami peningkatan dengan peningkatan rata-rata sebesar 52,11 persen pertiga tahun atau 17,37 persen pertahun. Sementara itu pola pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi pangan dengan persentase rata-rata sebesar 55,09 persen sedangkan untuk konsumsi non pangan hanya sebesar 44,01 persen. Namun demikian pola pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi telah mengalami pergeseran. Fungsi konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi selama periode 1993-2011 yaitu sebesar 25,8 persen dan non pangan sebesar 23,8 persen.

**Kata Kunci:** *Fungsi konsumsi, pola konsumsi, pangan dan non pangan*

## A. Pendahuluan

Proses pembangunan ekonomi provinsi Jambi yang berlangsung secara berkesinambungan akhir-akhir ini telah diikuti oleh peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita. Pada tahun 2002 pendapatan perkapita penduduk propinsi Jambi yaitu sebesar 4.083.562 rupiah dan kemudian terus meningkat menjadi 9.969.819 rupiah pada tahun 2008. Peningkatan ini terus terjadi setiap tahunnya. Hingga tahun 2011 pendapatan perkapita telah mencapai angka 14.851.536 rupiah.

Peningkatan kesejahteraan penduduk propinsi Jambi melalui peningkatan pendapatan perkapita ini juga telah diikuti oleh peningkatan pengeluaran konsumsi. Pada tahun 2002 pengeluaran konsumsi perkapita penduduk propinsi Jambi yaitu sebesar 1.752.000 rupiah dan tahun 2008 meningkat menjadi 3.224.736 rupiah serta 3.909.408 rupiah pada tahun 2011.

Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk propinsi Jambi tersebut tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder dan tersier, tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas. Setiap orang atau rumah tangga selalu melakukan kegiatan konsumsi guna memenuhi berbagai jenis kebutuhan hidupnya. Namun pada tahap awal kegiatan pembangunan biasanya seseorang atau rumah tangga akan melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer terutama kebutuhan akan

pangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang utama bagi seseorang untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Disamping itu juga karena masih rendahnya pendapatan yang mereka terima. Dengan kata lain semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan akan semakin berkurang sedangkan proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan pangan akan semakin meningkat.

Pada tahun 2002 proporsi pengeluaran untuk pangan penduduk propinsi Jambi yaitu sebesar 61,24 persen dari total pengeluaran konsumsi sedangkan proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan pangan hanya sebesar 38,76 persen. Namun pada tahun 2011 proporsi pengeluaran untuk konsumsi pangan menurun menjadi 54,20 persen sedangkan untuk konsumsi bukan pangan meningkat menjadi 45,80 persen. Perubahan pola pengeluaran konsumsi ini pada gilirannya juga akan diikuti oleh perubahan dalam fungsi konsumsi.

Dalam kaitan inilah perlu dilakukan kajian dan analisis yang lebih mendalam terhadap perubahan pola pengeluaran konsumsi dan perubahan fungsi konsumsi baik pangan maupun non pangan dari penduduk propinsi Jambi.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan pengeluaran konsumsi perkapita pangan

- dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi?
2. Bagaimana pola pengeluaran konsumsi perkapita pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi?
  3. Berapa besar *Marginal Propensity to Consume* (MPC) pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi?
  4. Bagaimana fungsi konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi?

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat terutama:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi tambahan bagi pemerintah daerah propinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah propinsi Jambi dalam menetapkan arah kebijakan serta program ketersediaan berbagai jenis pangan dan non pangan bagi penduduk perkotaan propinsi Jambi pada masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan acuan dan informasi tambahan bagi peneliti lainnya yang melakukan kajian dan analisis yang sama baik dalam aspek ruang maupun waktu yang berbeda pada masa yang akan datang.
3. Dapat memperkaya khazanah terhadap aplikasi dari teori dan fungsi konsumsi.

## B. Tinjauan Kepustakaan

### Konsep Konsumsi

Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi sehari-hari yang dilakukan seseorang atau rumah tangga maupun masyarakat baik yang

berpendapatan tinggi, sedang, maupun yang berpendapatan rendah guna memenuhi berbagai jenis kebutuhan hidup. Konsumsi yang dilakukan tersebut bersifat menghabiskan atau mengurangi *utility* dari suatu barang.

Menurut Winardi<sup>1</sup> konsumsi merupakan penggunaan langsung serta akhir dari suatu benda atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Berkenaan dengan konsumsi ini Suparmoko<sup>2</sup> mengemukakan bahwa konsumsi dibedakan 2 (dua) macam yaitu pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran rumah tangga yaitu pengeluaran sektor rumah tangga untuk membeli barang atau jasa dalam memenuhi atau memuaskan kebutuhannya.

Bagi suatu rumah tangga upaya yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa akan sangat tergantung pada sektor pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diterima atau diperoleh dari suatu rumah tangga maka akan semakin besar pula pengeluaran konsumsi dari suatu rumah tangga tersebut, begitu pula sebaliknya.

### Fungsi Konsumsi

Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi (C) dengan pendapatan (Y). Secara matematis fungsi konsumsi dinyatakan dalam bentuk berikut<sup>3</sup>.

$$C = f(Y)$$

<sup>1</sup> Winardi. 1981. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Penerbit Alumnus.

<sup>2</sup> Suparmoko. 1992. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE UGM.

<sup>3</sup> Suparmono. 2004. *Pengantar Ekonomi Makro (Teori, Soal dan Penyelesaiannya)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Berkaitan dengan fungsi konsumsi, Keynes<sup>4</sup> dalam teori konsumsinya mengemukakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan masyarakat (*autonomous consumption*) dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya pendapatan. Adapun bentuk persamaan matematisnya adalah sebagai berikut.

$$C = f(Y_d)$$

Jika diderivatiskan akan berubah menjadi.

$$C = C_0 + cY_d$$

Dimana:

C = konsumsi

C<sub>0</sub> = konsumsi otonomi yaitu besarnya pengeluaran konsumsi pada saat tidak ada pendapatan (Y = 0)

c = *marginal propensity to consume* (MPC)

Jadi  $c = MPC = \Delta C / \Delta Y$

Y<sub>d</sub> = pendapatan yang siap untuk dibelanjakan (*disposable income*)

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

Terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi seseorang atau rumah tangga baik secara keseluruhan maupun secara perorangan adalah penda-

patan itu sendiri yang dominan. Menurut Sadono Sukirno<sup>5</sup> pada tingkat pendapatan yang paling rendah, pengeluaran seseorang atau rumah tangga cenderung lebih besar dari pendapatannya. Sedangkan pada suatu tingkatan yang cukup tinggi, konsumsi seseorang atau rumah tangga akan sama besarnya dengan pendapatannya. Apabila pendapatan seseorang atau rumah tangga mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, maka seseorang atau rumah tangga tidak akan menggunakan seluruh pendapatan yang dapat dibelanjakannya tersebut, melainkan sebagian merupakan tabungan.

Faktor utama yang menentukan konsumsi seseorang atau rumah tangga akan barang dan jasa adalah tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga tersebut. Tingkat pendapatan berpengaruh positif, dalam arti apabila pendapatan konsumen naik maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan begitu juga sebaliknya. Perilaku ini terutama untuk barang normal atau barang yang perilakunya mengikuti hukum permintaan dan penawaran.

Tingkat harga barang dan jasa di pasar juga menentukan pengeluaran konsumsi seseorang atau rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan pendapatan riil yang diterima oleh konsumen tersebut. Secara nominal, pendapatan konsumen mungkin sama setiap periodenya akan tetapi apabila harga mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, maka

<sup>4</sup> Muana, Nanga. 2005. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>5</sup> Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Revisi Ketiga Belas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya beli seseorang atau rumah tangga. Dengan kata lain, tingkat harga berhubungan negatif dengan pengeluaran konsumsi. Apabila harga mengalami kenaikan, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.

### **Pola Pengeluaran Konsumsi**

Pola pengeluaran konsumsi menggambarkan komposisi dan proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi baik untuk pangan maupun non pangan. Pengeluaran untuk konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga meliputi (1) pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan dan (2) pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan<sup>6</sup>. Dengan melihat proporsi pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan tersebut akan dapat diketahui apakah kesejahteraan meningkat atau sebaliknya. Kesejahteraan seseorang atau rumah tangga maupun masyarakat dikatakan meningkat apabila persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan semakin meningkat dibandingkan dengan total pengeluarannya, begitu pula sebaliknya.

Di negara-negara maju persentase pengeluaran konsumsi penduduk untuk makanan terhadap total pengeluaran biasanya berada di bawah 50 persen. Sedangkan di negara sedang berkembang justru sebaliknya yaitu persentase pengeluaran konsumsi penduduk untuk

makanan jauh lebih besar dari persentase pengeluaran bukan makanan<sup>7</sup>.

Menurut Pakpahan dan Hartati<sup>8</sup> bahwa di Afrika dan Jepang persentase pengeluaran untuk makanan relatif sangat kecil yaitu masing-masing sebesar 17,96 persen dan 32,26 persen pada tahun 1976. Disamping itu tingginya persentase untuk makanan di negara-negara berkembang berkaitan erat dengan proses perbaikan pendapatan yang dirasakan masyarakat. Untuk menaikkan kebutuhan gizi penduduk di negara berkembang adalah dengan menambah pengeluaran konsumsi makanan, sementara untuk kebutuhan diluar makanan baru dipenuhi setelah pengeluaran konsumsi makanan tercapai.

Di Indonesia pengeluaran untuk konsumsi makanan masih merupakan bagian yang besar dan sangat penting bagi sebagian besar penduduk. Hal ini diperlihatkan oleh masih besarnya pangsa pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran yaitu sebesar 67,2 persen untuk rata-rata rumah tangga di daerah pedesaan dan 53,35 persen untuk daerah perkotaan pada tahun 1987<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Anonim. 1990. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Biro Pusat Statistik (BPS).

---

<sup>7</sup> Anonim. 1993. *Pengeluaran Konsumsi Untuk Penduduk Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Biro Pusat Statistik (BPS).

<sup>8</sup> Pakpahan, Agus dan Hartati, S. 1990. "Perkembangan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kota di Indonesia", *Majalah Forum Statistik*, No.3 Tahun IX, September. Jakarta: BPS.

<sup>9</sup> Anonim. 1987. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Biro Pusat Statistik (BPS).

Makanan merupakan kebutuhan manusia untuk tetap hidup sehingga sebesar apapun pendapatan seseorang ia akan tetap berusaha untuk mendapatkan makanan yang memadai. Seseorang atau suatu rumah tangga akan terus menambah konsumsi makanannya sejalan dengan bertambahnya pendapatan, namun sampai batas tertentu tidak lagi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, karena kebutuhan manusia akan makanan pada dasarnya mempunyai titik jenuh. Bila secara kuantitas kebutuhan seseorang sudah terpenuhi maka lazimnya ia akan mementingkan kualitas atau beralih pada pemenuhan kebutuhan bukan makanan. Dengan demikian ada kecenderungan semakin berkurang persentase pendapatan yang dibelanjakannya untuk makanan<sup>10</sup>.

Menurut Biro Pusat Statistik dalam Suseno<sup>11</sup> bahwa komposisi untuk pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia terdiri dari:

- a. Pengeluaran untuk konsumsi makanan meliputi: (1) padi-padian; (2) umbi-umbian; (3) ikan; (4) daging; (5) telur dan susu; (6) sayur-sayuran; (7) kacang-kacangan; (8) buah-buahan; (9) konsumsi lainnya; (10) makanan yang sudah jadi; (11) makanan yang mengandung alkohol; (12) tembakau dan sirih.
- b. Pengeluaran konsumsi bukan makanan yang meliputi: (1) perumahan, bahan bakar, penerangan;

- (2) aneka barang dan jasa; (3) pakaian dan alas kaki, penutup kepala; (4) barang tahan lama; (5) pajak pemakaian dan premi asuransi; (6) keperluan pesta dan upacara.

### C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun jenis data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Data pendapatan perkapita penduduk propinsi Jambi.
- 2) Data pengeluaran konsumsi perkapita penduduk propinsi Jambi.
- 3) Data pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non pangan penduduk propinsi Jambi.
- 4) Data pengeluaran konsumsi untuk berbagai jenis pangan dan non pangan.

Sumber data dari berbagai jenis data sekunder tersebut berasal dari berbagai publikasi Badan Pusat Statistik propinsi Jambi yaitu berupa:

- 1) PDRB propinsi Jambi menurut lapangan usaha.
- 2) Pengeluaran untuk konsumsi penduduk propinsi Jambi, hasil SUSENAS 1993-2011.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif. Metode deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara sistematis dan aktual mengenai fakta, gejala dan fenomena dari setiap variabel penelitian. Sementara metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui atau melakukan estimasi fungsi konsumsi

---

<sup>10</sup> Anonim. 1987. *Op cit.*

<sup>11</sup> Suseno. 1993. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi.

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi

Bagi sebagian besar penduduk perkotaan propinsi Jambi upaya pemenuhan kebutuhan hidup ini dilakukan dengan membeli bukan diproduksi atau dihasilkan sendiri. Hal ini berarti proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi akan semakin besar diban-

dingkan dengan pengeluaran konsumsi penduduk pedesaan di propinsi Jambi.

Mengingat sebagian besar pemenuhan kebutuhan hidup penduduk perkotaan propinsi Jambi dilakukan dengan cara membeli, maka faktor harga dari berbagai jenis barang kebutuhan juga menentukan besarnya pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi kenaikan harga dari berbagai jenis barang dan jasa maka semakin besar pula pengeluaran yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**Tabel 1. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi Tahun 1993-2011 (Rp/bulan)**

Tahun	Pengeluaran Konsumsi	Perkembangan (%)
1993	52.708	-
1996	80.466	52,66
1999	151.715	88,54
2002	238.407	57,14
2005	410.708	72,27
2008	512.329	24,74
2011	601.080	17,32
<b>Rata-rata</b>		<b>52,11</b>

*Sumber: BPS Propinsi Jambi, Hasil SUSENAS 1993-2011 (data diolah).*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi selama tahun 1993-2011 selalu meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan pertiga tahunnya rata-rata sebesar 52,11 persen atau rata-rata sebesar 17,37 persen pertahun. Pada tahun 1993 pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi yaitu sebesar 52.708 rupiah perkapita perbulan atau

sebesar 632.456 rupiah perkapita pertahun dan pada tahun 2002 telah meningkat 80.466 rupiah perkapita perbulan atau sebesar 965.592 rupiah perkapita pertahun. Hingga tahun 2011 pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi telah mencapai angka 601.080 rupiah perkapita perbulan atau sebesar 7.212.960 rupiah perkapita pertahun.

Terjadinya peningkatan pengeluaran konsumsi perkapita penduduk

perkotaan propinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai faktor yaitu terjadinya peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Peningkatan pendapatan ini telah menyebabkan alokasi pengeluaran konsumsi juga meningkat, baik untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi pangan maupun non pangan. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan ini juga terjadi karena semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kebutuhan serta faktor kenaikan harga dari berbagai jenis barang kebutuhan.

Peningkatan tertinggi dalam pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi ini terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 88,54 persen. Hal ini terjadi sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi

pada tahun 1998 dan tahun 1999. Pada saat krisis ini terjadi laju kenaikan harga (inflasi) yang tinggi dalam perekonomian propinsi Jambi yaitu sebesar 72 persen.

### **Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita untuk Pangan dan Non Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi**

Analisis lebih lanjut tentang pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi juga dapat dilihat dari perkembangan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non pangan. Gambaran perkembangan pengeluaran konsumsi untuk kelompok pengeluaran ini disajikan secara rinci dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Perbulan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi untuk Pangan dan Non Pangan Tahun 1993-2011**

Tahun	Pengeluaran Konsumsi (Rp)		Perkembangan (%)	
	Pangan	Non Pangan	Pangan	Non Pangan
1993	29.577	23.210	-	-
1996	46.323	33.392	56,61	47,11
1999	96.126	55.588	107,51	62,80
2002	146.000	92.406	51,88	66,25
2005	193.156	217.552	32,30	135,42
2008	268.728	243.605	39,12	11,98
2011	325.794	275.286	21,23	13,01
	<b>Rata-rata</b>		<b>51,44</b>	<b>56,10</b>

*Sumber: BPS Propinsi Jambi, Hasil SUSENAS 1993-2011.*

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi baik untuk pangan maupun non pangan selalu meningkat. Namun

peningkatan pengeluaran konsumsi non pangan lebih besar dari peningkatan pengeluaran konsumsi untuk pangan. Pengeluaran untuk konsumsi non pangan selama periode

waktu 1993-2011 meningkat rata-rata sebesar 56,10 persen pertiga tahun atau sebesar 18,70 persen pertahun. Sedangkan pengeluaran konsumsi untuk pangan dalam periode waktu yang sama hanya meningkat sebesar 51,44 persen pertiga tahun atau 17,15 persen pertahun.

Pada tahun 1993 pengeluaran konsumsi perkapita sebulan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi hanya sebesar 29.577 rupiah perkapita perbulan. Pengeluaran untuk konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi ini terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2011 telah mencapai angka 325.794 rupiah perkapita perbulan.

Peningkatan pengeluaran konsumsi perkapita untuk pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi disamping karena semakin meningkatnya pendapatan perkapita juga disebabkan semakin beragamnya jenis pangan yang dikonsumsi serta faktor kuantitas dan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi. Faktor lain yang juga sangat menentukan peningkatan pengeluaran untuk konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi ini adalah faktor inflasi dari berbagai jenis barang kebutuhan pokok terutama pangan.

Peningkatan tertinggi pengeluaran konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi ini terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 107,51 persen. Hal ini terjadi sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999 dengan inflasi di propinsi Jambi sebesar 72 persen.

Sementara itu dalam periode waktu yang sama pengeluaran perkapita untuk konsumsi non pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi juga selalu meningkat. Pada tahun 1993 pengeluaran konsumsi non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi yaitu sebesar 23.210 rupiah perkapita perbulan, namun pada tahun 2011 pengeluaran perkapita untuk konsumsi non pangan meningkat menjadi 275.286 rupiah perkapita perbulan.

Walaupun peningkatan pengeluaran perkapita sebulan untuk konsumsi non pangan lebih tinggi (rata-rata 56,10 persen) dari peningkatan pengeluaran untuk pangan, namun secara absolut pengeluaran perkapita sebulan untuk pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi masih lebih besar dari pengeluaran untuk konsumsi non pangan.

### **Pola Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi**

Pola pengeluaran konsumsi menggambarkan proporsi pengeluaran penduduk perkotaan propinsi Jambi yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan non pangan. Mengingat pangan masih merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, maka pengeluaran konsumsi pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi masih tetap dominan dibandingkan pengeluaran konsumsi non pangan dalam pola pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Perkapita Perbulan untuk Pangan dan Non Pangan Penduduk Perkotaan Prov. Jambi Tahun 1993-2011**

Tahun	Proporsi Pengeluaran	
	Pangan	Non Pangan
1993	56,11	43,89
1996	57,57	42,43
1999	63,36	36,64
2002	61,24	38,76
2005	47,03	52,97
2008	52,45	47,55
2011	54,20	45,80
<b>Rata-rata</b>	<b>55,99</b>	<b>44,01</b>

*Sumber: BPS Propinsi Jambi, Hasil SUSENAS 1993-2011 (data diolah).*

Selama tahun 1993-2011 proporsi pengeluaran konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi berfluktuasi dan tetap mendominasi pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi, kecuali tahun 2005 yang proporsinya hanya sebesar 47,03 persen dari total pengeluaran. Selama tahun 1993-2011 proporsi pengeluaran untuk pangan rata-rata sebesar 55,99 persen, sedangkan proporsi non pangan rata-rata sebesar 44,01 persen. Hal ini berarti pola pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi masih didominasi pengeluaran untuk konsumsi pangan.

Walaupun pola pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi masih didominasi untuk pengeluaran pangan, namun terjadi pergeseran dalam pola pengeluaran konsumsi. Hal ini ditandai oleh cenderung menurunnya proporsi pengeluaran konsumsi pangan terhadap total pengeluaran, serta cenderung meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi non pangan.

Walaupun terjadi pergeseran dalam pola pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011, namun pergeserannya masih sangat lambat. Hal ini antara lain disebabkan karena penduduk perkotaan propinsi Jambi masih tetap mementingkan serta mendahulukan pemenuhan kebutuhan pangan yang sebagian besar pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan membeli bukan diproduksi atau dihasilkan sendiri, terutama untuk jenis makanan dan minuman jadi.

#### ***Marginal Propensity to Consume (MPC) untuk Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi***

*Marginal propensity to consume (MPC)* merupakan tambahan perubahan konsumsi sebagai akibat dari terjadinya tambahan pendapatan. Dalam kaitannya dengan pangan, maka MPC untuk pangan merupakan besarnya proporsi peningkatan pengeluaran untuk konsumsi pangan karena adanya peningkatan dalam

pendapatan perkapita penduduk propinsi Jambi.

**Tabel 4. Marginal Propensity to Consume (MPC) Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi Tahun 1996-2011**

Tahun	$\Delta Y$	$\Delta C$	MPC
1996	448.915	200.952	0,4476
1999	1.288.661	597.636	0,4638
2002	1.341.975	598.486	0,4460
2005	2.123.856	565.872	0,2664
2008	3.742.964	906.864	0,2423
2011	4.890.717	684.672	0,1400

Sumber: Lampiran 1, Hasil Perhitungan MPC Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa *marginal propensity to consume* (MPC) untuk konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1996-2011 cenderung menurun, kecuali pada tahun 1999 yang justru meningkat. Pada tahun 1996 MPC untuk pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi yaitu sebesar 0,4476. Ini artinya bahwa 44,76 persen kenaikan pendapatan perkapita penduduk perkotaan tahun 1996 dialokasikan untuk peningkatan pengeluaran konsumsi pangan. Sedangkan tahun 2011 MPC untuk pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi menurun menjadi 1,400. Artinya hanya sebesar 14,00 persen dari peningkatan pendapatan perkapita yang digunakan

untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi pangan.

MPC pangan yang semakin menurun ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1996-2011 yang dialokasikan untuk tambahan pengeluaran konsumsi pangan cenderung semakin menurun.

#### ***Marginal Propensity to Consume (MPC) Non Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi***

Disamping dialokasikan untuk peningkatan pengeluaran konsumsi pangan, peningkatan pendapatan perkapita juga dialokasikan untuk peningkatan pengeluaran konsumsi non pangan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Marginal Propensity to Consume (MPC) Non Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi Tahun 1996-2011**

Tahun	$\Delta Y$	$\Delta C$	MPC
1996	448.915	122.188	0,2722
1999	1.288.661	266.352	0,2067
2002	1.341.975	433.746	0,3232

2005	2.123.858	1.509.822	0,7108
2008	3.742.964	311.436	0,0832
2011	4.890.717	381.742	0,0780

Sumber: Lampiran 2, Hasil Perhitungan MPC Non Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi.

Sama halnya dengan MPC pangan, ternyata MPC non pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi selama tahun 1996-2011 juga cenderung menurun dengan penurunan yang cukup besar. Pada tahun 1996 MPC non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi yaitu sebesar 0,2722. Namun pada tahun 2011 MPC non pangan hanya sebesar 0,0780. Hal ini berarti bahwa proporsi peningkatan pendapatan perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi yang dialokasikan untuk tambahan peningkatan pengeluaran konsumsi non pangan persentasenya semakin kecil.

Walaupun MPC non pangan penduduk perkotaan cenderung menurun, namun pada tahun 2005 merupakan MPC non pangan yang tertinggi yaitu sebesar 0,7108. Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi sebagian besar (71,08 persen) digunakan untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan non pangan.

### **Fungsi Konsumsi Pangan dan Non Pangan Penduduk Perkotaan Propinsi Jambi**

Fungsi konsumsi pangan menunjukkan hubungan antara pengeluaran konsumsi perkapita untuk pangan dengan pendapatan perkapita dari penduduk perkotaan propinsi Jambi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bentuk fungsi konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi

Jambi dalam bentuk persamaan berikut.

$$C = 408.795 + 0,258 Y$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- 1)  $C_0 = 408.795$  artinya bahwa besarnya konsumsi otonom (*autonomous consumption*) untuk konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 yaitu sebesar 408.795 rupiah perkapita pertahun. Dengan kata lain besarnya konsumsi untuk pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi tanpa adanya pendapatan perkapita, maka besarnya pengeluaran konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi yaitu sebesar 408.795 rupiah perkapita pertahun.
- 2)  $b = 0,258$  artinya setiap terjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi selama periode waktu 1993-2011 maka sebesar 0,258 atau 25,8 persen digunakan untuk pengeluaran konsumsi pangan.

Fungsi konsumsi non pangan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara pengeluaran konsumsi perkapita untuk non pangan pendapatan perkapita dari penduduk perkotaan propinsi Jambi.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh fungsi konsumsi non

pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 dalam bentuk persamaan berikut.

$$C = 240.003 + 0,238 Y$$

Fungsi konsumsi non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi tersebut menunjukkan bahwa:

- 1)  $C_0 = 240.003$  artinya besarnya konsumsi otonom (*autonomous consumption*) untuk konsumsi non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 yaitu sebesar 240.003 rupiah perkapita pertahun. Dengan kata lain besarnya konsumsi untuk non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi tanpa adanya pendapatan perkapita, maka besarnya pengeluaran konsumsi non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi yaitu sebesar 408.795 rupiah perkapita pertahun.
- 2)  $b = 0,238$  artinya setiap peningkatan pendapatan perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 sebesar 0,238 atau 23,8 persen dari peningkatan pendapatan perkapita digunakan untuk tambahan atau peningkatan pengeluaran konsumsi non pangan.

Berdasarkan kedua fungsi konsumsi di atas yaitu fungsi konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi ternyata konsumsi otonom ( $C_0$ ) dan *marginal propensity to consume* (MPC) untuk pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi selama periode waktu 1993-2011 lebih besar dibandingkan dengan konsumsi otonom ( $C_0$ ) dan *marginal propensity to*

*consume* (MPC) untuk non pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi selama periode waktu 1993-2011.

## E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Selama periode waktu 1993-2011 pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi selalu meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 52,11 persen pertiga tahun atau sebesar 17,37 persen pertahun.
2. Peningkatan pengeluaran perkapita untuk konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 juga selalu meningkat, namun peningkatan pengeluaran untuk konsumsi non pangan lebih tinggi yaitu rata-rata sebesar 56,10 persen pertiga tahun dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran perkapita untuk pangan yaitu rata-rata sebesar 51,44 persen pertiga tahun.
3. Pola pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi selama periode 1993-2011 masih didominasi untuk konsumsi pangan dengan proporsi rata-rata sebesar 55,99 persen, sedangkan proporsi pengeluaran non pangan rata-rata sebesar 44,01 persen. Namun pola pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan propinsi Jambi telah mengalami perubahan dan pergeseran walaupun pergeseran relatif lambat. Proporsi pengeluaran untuk pangan menurun yaitu dari 56,11 persen pada tahun 1993 menurun

menjadi 54,20 persen pada tahun 2011. Sedangkan proporsi pengeluaran non pangan meningkat yaitu dari 43,89 persen pada tahun 1993 meningkat menjadi 45,80 persen tahun 2011.

4. *Marginal propensity to consume* (MPC) pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 cenderung menurun. Namun MPC untuk pangan masih lebih besar dari MPC non pangan.
5. Konsumsi otonom (Co) untuk pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 yaitu sebesar 408.795 rupiah perkapita pertahun. Sedangkan konsumsi otonom (Co) untuk non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi periode waktu 1993-2011 lebih rendah dari konsumsi otonom (Co) pangan yaitu sebesar 240.003 rupiah perkapita pertahun. Fungsi konsumsi pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi maka sebesar 25,8 persen dialokasikan untuk tambahan peningkatan pengeluaran konsumsi pangan. Sedangkan untuk

tambahan peningkatan pengeluaran konsumsi non pangan hanya sebesar 23,8 persen.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Mengingat perkembangan pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan dari penduduk perkotaan propinsi Jambi selalu meningkat, maka pemerintah daerah perlu menjamin ketersediaan bahan pangan dan non pangan karena terjadinya peningkatan konsumsi pangan dan non pangan penduduk perkotaan propinsi Jambi.
2. Mengingat pola konsumsi pangan masih mendominasi pengeluaran konsumsi perkapita penduduk perkotaan propinsi Jambi terutama untuk jenis pangan makanan dan minuman jadi, ikan, padi-padian, sayur-sayuran serta tembakau dan sirih maka pemerintah daerah propinsi Jambi serta pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Jambi dan instansi terkait lainnya perlu berupaya meningkatkan ketersediaan kelima jenis bahan pangan tersebut terutama dengan cara meningkatkan produksi yang dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah propinsi Jambi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim. 1987. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Biro Pusat Statistik (BPS).
- Anonim. 1990. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Biro Pusat Statistik (BPS).
- Anonim. 1993. *Pengeluaran Konsumsi Untuk Penduduk Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Biro Pusat Statistik (BPS).

- Muana, Nanga. 2005. *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Pakpahan, Agus dan Hartati, S. 1990. “Perkembangan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kota di Indonesia”, *Majalah Forum Statistik*, No.3 Tahun IX, September. Jakarta: BPS.
- Sukrino, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Revisi Ketiga Belas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. 1992. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Suparmono. 2004. *Pengantar Ekonomi Makro (Teori, Soal dan Penyelesaiannya)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suseno. 1993. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Winardi. 1981. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Penerbit Alumnus.